



# LAPORAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 2023

**BALAI VETERINER BANJARBARU**

**LAPORAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN 2023**

**1. Keterbukaan Informasi Publik**

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28F menyebutkan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Hal itu lebih dipertegas lagi dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi Ketahanan Nasional. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggara negara, badan publik lainnya serta pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, serta dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang pada akhirnya dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggungjawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga tercipta pemerintah yang baik (*good governance*).

Selanjutnya guna mendukung Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Pertanian di awal pembentukan PPID mengeluarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 yang saat ini telah diperbarui dengan diterbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/ Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Pelaksana lingkup Kementerian Pertanian dan surat keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru No. 178/KPTS/OT.050/F5.E/01/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Veteriner Banjarbaru

Balai Veteriner Banjarbaru merupakan salah satu unit kerja teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan fungsi sebagai PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian.

*Azas Keterbukaan Informasi Publik:*

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana;
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

*Tujuan Keterbukaan Informasi Publik:*

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau;

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

## 2. Keputusan Kepala Balai Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru No. 178/KPTS/OT.050/F5.E/01/2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Veteriner Banjarbaru tanggal 02 Januari 2023, pejabat dan petugas harian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel.1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pembantu Pelaksana serta Petugas Harian PPID Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2023.

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID
1.	drh. IRA NURMALA HANI NIP. 199503162020122004	Medik Veteriner Pertama	PPID Pelaksana
2.	PRIYONO, S.Kom NIP. 198010072011011008	Pranata Komputer	PPID Pembantu Pelaksana
3.	RUTI WINDARI, A.Md. NIP. 19910626201532002	Paramedik Veteriner	PPID Petugas Harian
4.	SRIYANTO, A. Md NIP. 198301142011011008	Pustakawan	PPID Petugas Harian
5.	WIDHIYAH ASTUTI NIP. 199106282011012001	Paramedik Veteriner	PPID Petugas Harian

PPID Pelaksana, Pembantu Pelaksana dan Petugas Harian PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

### A. PPID Pelaksana:

1. Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian pengamanan informasi dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan uji konsekuensi;
3. Menerbitkan daftar informasi publik;
4. Menyiapkan saran/tanggapan/ atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik;
7. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID pelaksana eselon I dengan tembusan kepada PPID utama.

### B. PPID Pembantu Pelaksana:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara

- tepat;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
  4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
  5. Menyusun laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

C. Petugas Harian PPID:

1. Menjaga konter layanan dan diorama dengan baik;
2. Melakukan penataan dan kebersihan ruangan layanan dan diorama;
3. Menerima tamu dan/atau pemohon informasi publik;
4. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat.

### **3. Tugas dan Tanggungjawab PPID.**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Badan Publik. Di Kementerian Pertanian, Undang-Undang tersebut telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Melalui Peraturan Menteri tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID yang kemudian pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/ Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik. Balai Veteriner Banjarbaru merupakan salah satu unit kerja teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mempunyai tugas dan kewajiban sebagai PPID Pembantu Pelaksana di lingkup Kementerian Pertanian.

### Tugas dan Tanggung Jawab PPID Terkait Dokumentasi

NO	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait Dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10)	PPID		
		PPID UTAMA	PPID Pelaksana	PPID Pembantu Pelaksana
1.	Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian	√	√	√
2.	Daftar informasi publik	√	√	√
3.	Pengujian konsekuensi	√	*	*
4.	Klasifikasi informasi publik	√	*	*

Catatan:

(√) : mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan

(\* ) : menyiapkan bahan

### Tugas dan Tanggung Jawab PPID Terkait TIK

NO.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait TIK (Permentan No. 25/2016)	PPID	
		PPID UTAMA	PPID Pelaksana/ Pembantu Pelaksana
1.	Pengembangan sistem informasi/aplikasi pendukung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)	√	X
2.	Penyediaan server penyimpanan e-dokumen	√	X
3.	Penyediaan hardware di UK/UPT	X	√
4.	Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT	X	√
5.	Monev pelaksanaan PID	√	√
6.	Penyediaan konten elektronis	√	√

### Moto Balai Veteriner Banjarbaru

- Menyidik
- Menguji
- Memberi solusi

### Janji Layanan Balai Veteriner Banjarbaru

- Cepat
- Akurat
- Bertanggungjawab

## Maklumat Pelayanan Balai Veteriner Banjarbaru



### Maklumat Pelayanan

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

drh. Putut Eko Wibowo - Kepala Balai Veteriner Banjarbaru

#### 4. Pelayanan Informasi Publik Balai Veteriner Banjarbaru

a. Fasilitas, sarana dan prasarana untuk Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru:

- 1) Bagian Informasi Publik (PPID) yaitu menyediakan fasilitas kepada pemohon informasi yang datang secara langsung ke Balai Veteriner Banjarbaru.
- 2) Ruang Publik Akses Internet Balai Veteriner menyediakan fasilitas internet nirkabel/wifi yang dapat diakses di lingkungan areal Balai Veteriner Banjarbaru.



3) Penyediaan Informasi Publik yang melalui media:

- Telpon/Fax: (0511) 4772249 / Fax. (0511) 4773249
- E-mail: [bvetbjbr@pertanian.go.id](mailto:bvetbjbr@pertanian.go.id)
- Website: <https://bvetbanjarbaru-ppid.pertanian.go.id>

b. Sumber Daya Manusia

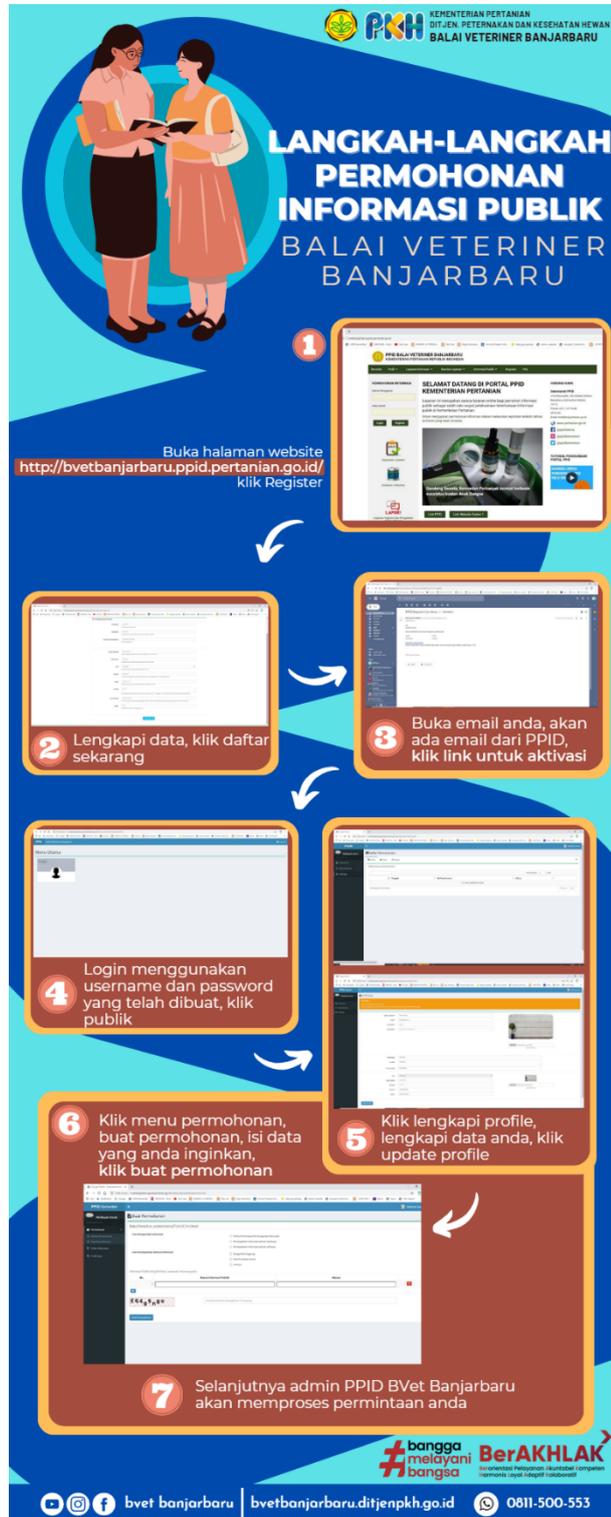
Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi 1 orang pelaksana, 1 orang pembantu pelaksana, 3 orang petugas harian dan seluruh pegawai di Balai Veteriner Banjarbaru.

c. Waktu Pelayanan

Hari Senin s.d. Kamis mulai pukul 07.30 – 15.30 WITA (istirahat jam 12.00 - 13.00).

Hari Jumat jam 07.30 – 16.00 (Istirahat jam 12.00 - 13.30)

d. Alur pelayanan PPID

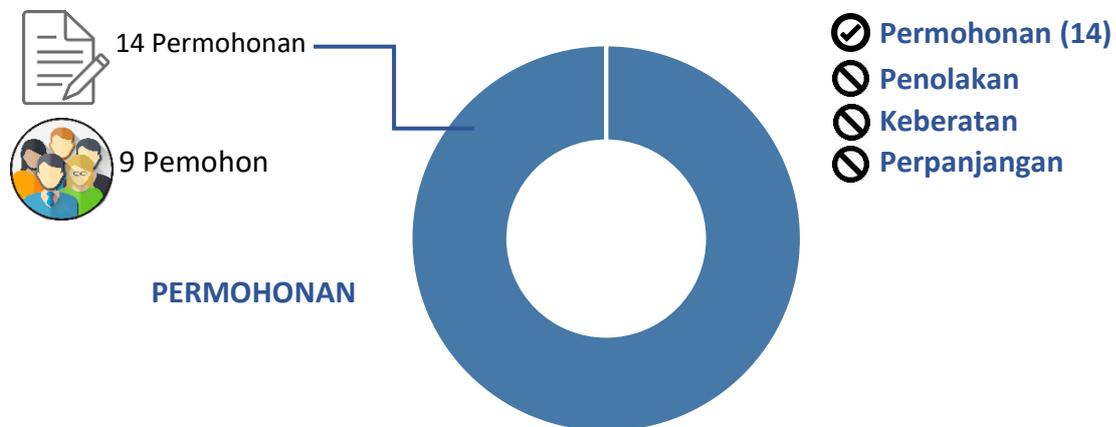
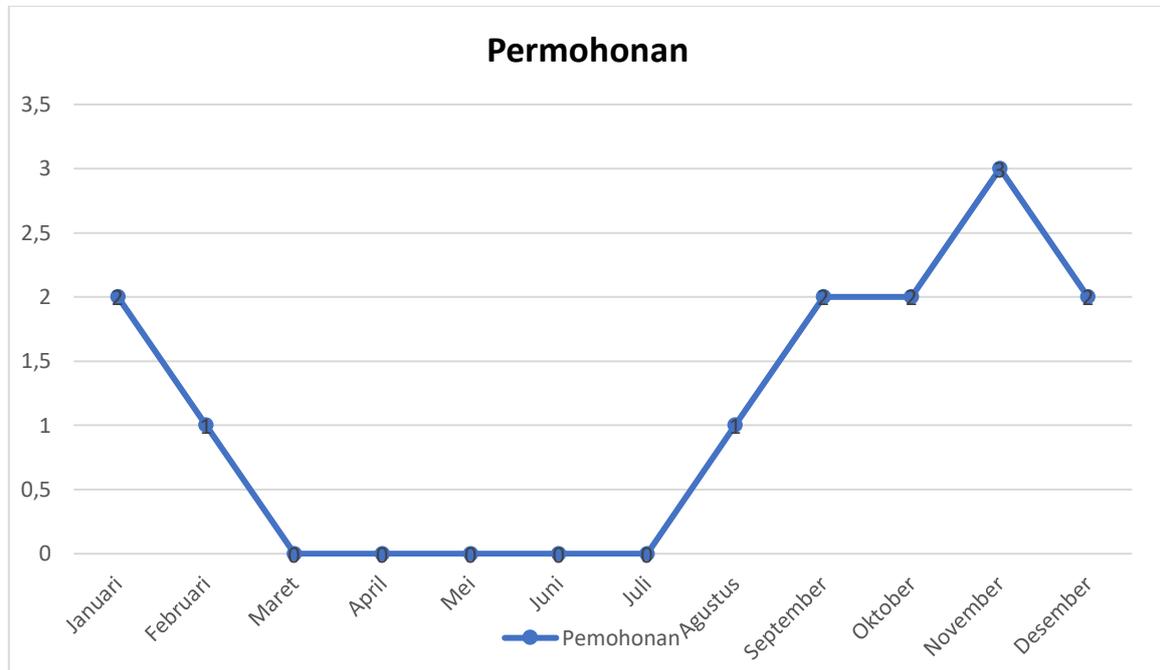


e. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2023.

## 5. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun Tahun 2023

Grafik Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID Tahun 2023



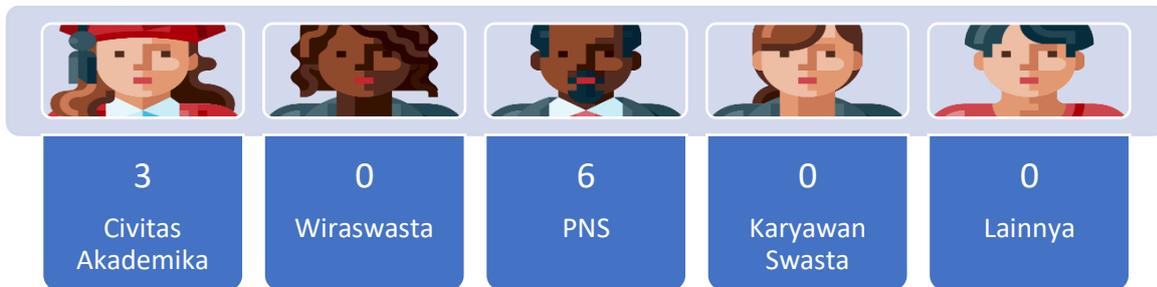
## Pelayanan Informasi Publik



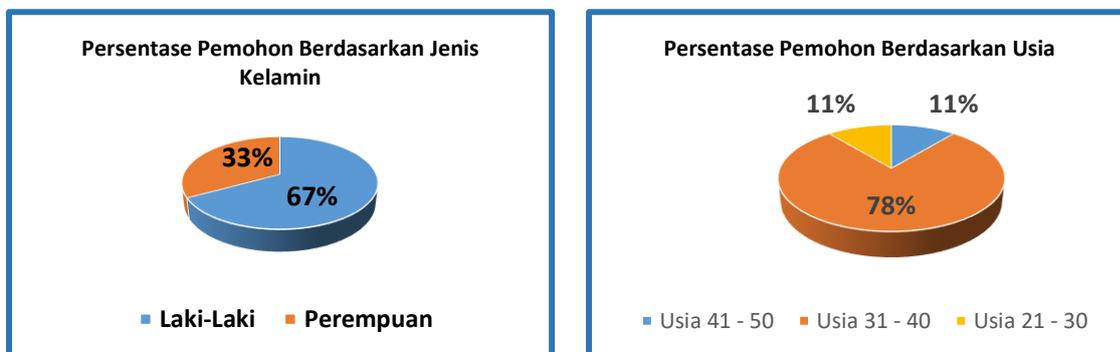
### Jumlah Pengelompokan Permohonan Informasi Publik melalui Berbagai Media



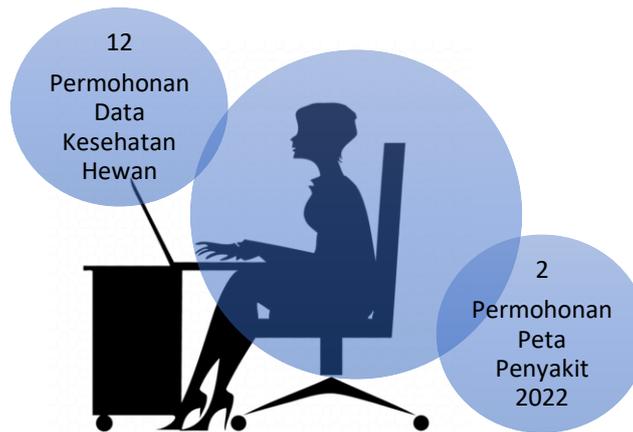
### Kategori Pekerjaan Pemohon Informasi Publik



### Kategori Jenis Kelamin dan Umur Pemohon Informasi Publik



## Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan



### 6. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru tahun anggaran 2023 yang meliputi anggaran penguatan pelayanan informasi dan pengelolaan website PPID.

### 7. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Inovasi dan kolaborasi merupakan salah satu kunci utama dalam memaksimalkan keterbukaan informasi publik. Untuk inovasi, Balai Veteriner Banjarbaru telah melakukan digitalisasi dalam seluruh proses alur layanan salah satunya adalah pengujian laboratorium kesehatan hewan, mulai dari registrasi sampai dengan penyampaian laporan hasil. Sedangkan untuk kolaborasi, Balai Veteriner Banjarbaru melakukan pembinaan dan pendampingan terkait pengujian kesehatan hewan di Laboratorium Daerah dan Laboratorium Karantina Hewan di Wilayah Kalimantan.

### 8. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Permintaan informasi publik yang masuk melalui website PPID Balai Veteriner Banjarbaru masih belum optimal, sebagian besar pengguna jasa/layanan terutama pihak perguruan tinggi dan swasta masih belum populer dengan adanya permohonan pelayanan informasi publik melalui website PPID yang telah disediakan di website Balai Veteriner Banjarbaru. Balai Veteriner Banjarbaru sudah memberikan langkah-langkah permohonan informasi melalui website/portal PPID akan tetapi beberapa pengguna jasa/layanan tetap masih perlu dibimbing pada saat aplikasi penginputan data permohonan melalui website (secara online).

## **9. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

- Meningkatkan koordinasi dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan publik kepada semua pengguna jasa/layanan di Balai Veteriner Banjarbaru.
- Meningkatkan pelayanan terhadap kecepatan respon dan menindaklanjuti segera atas permohonan yang telah diajukan.

### **PENUTUP**

Demikian laporan PPID tahun 2023 Balai Veteriner Banjarbaru ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2023.